



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2009-2010**

SENIN, 4 JANUARI 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2009-2010**

SENIN, 4 JANUARI 2010

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat bertemu kembali di dalam forum Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, sejumlah Anggota Dewan yang terdiri dari seluruh unsur fraksi telah menandatangani daftar hadir dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Sidang Dewan yang terhormat,

Saat ini, Bangsa Indonesia masih dalam suasana berkabung. Tiga tokoh nasional berturut-turut telah wafat dalam sepekan terakhir. Tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden RI ke-4 telah menghadap sang Khalik. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 pukul 05.00 WIB telah wafat Dr. Fransiscus Xaverius Seda (Frans Seda) dan kemarin sore, 3 Januari 2010 pukul 15.30 WIB kita dikejutkan dengan wafatnya Dr. Marwoto Mitrohardjono, Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. *Innalilahi wainna ilaihi roji'un.*

Kepergian Gus Dur telah meninggalkan duka yang mendalam bagi Bangsa Indonesia. Indonesia telah kehilangan seorang tokoh, seorang Guru Bangsa yang telah mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara Indonesia. Komitmennya yang kuat terhadap semangat kebangsaan, demokrasi dan pluralisme mampu menjadikan beliau sebagai tokoh dan negarawan yang sangat dihargai, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, walaupun pendapat beliau kadang kala mengundang kontroversi.

Bapak Frans Seda kita kenal sebagai tokoh tiga zaman, pernah menduduki beberapa jabatan menteri di masa Orde Baru, Penasehat Ekonomi yang kritis dan handal. Dalam masalah pembangunan ekonomi, pemikiran-pemikiran beliau cukup cemerlang.

Adapun Dr. Marwoto Mitrohardjono adalah salah satu Pimpinan DPR-RI yang sangat berdedikasi, ide-ide beliau bagi peningkatan kinerja Dewan cukup baik. DPR kehilangan tokoh yang memiliki semangat dalam melaksanakan tugas walaupun kondisi kesehatan beliau akhir-akhir ini tidak mendukung. Jenazah beliau akan disemayamkan di Plaza Nusantara Gedung DPR setelah Sidang Paripurna ini. Selanjutnya akan dilakukan sholat jenazah setelah sholat dhuhur di Masjid Baitul Rahman DPR dan akan diberangkatkan ke peristirahatan terakhir di Pemakaman San Diego Hills Karawang.

Untuk menghormati jasa-jasa beliau, kami mengajak para anggota Dewan untuk berdiri, mengheningkan cipta bagi para almarhum

seraya membacakan Surat Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragamalain supaya menyesuaikan. Mengheningkan Cipta dimulai.

<p style="text-align: center;">MENGHENINGKAN CIPTA</p>

Mengheningkan cipta, selesai.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Tata Tertib, maka selaku Pimpinan Dewan, kami akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010 dengan menguraikan rencana kegiatan Dewan dalam Masa Sidang ini dan beberapa permasalahan, yang menjadi perhatian kita bersama.

Mengawali pidato pembukaan ini, izinkanlah kami mengucapkan Selamat Hari Natal, khususnya bagi umat Kristiani yang merayakannya, serta Selamat Tahun Baru 1431 Hijriah dan Selamat Tahun Baru 2010 Masehi. Semoga tahun yang baru ini memberikan semangat dan tekad baru untuk menjadikan Bangsa dan Negara Republik Indonesia lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga, dalam perjalanannya, bangsa kita dihindarkan dari berbagai bencana, dapat melangkah maju dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, dan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan dibukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010 hari ini, Dewan akan segera memulai Masa Sidang sampai dengan 5 Maret 2010 mendatang. Dengan demikian, Masa Sidang ini memiliki 44 hari kerja dari 60 hari kalender. Karakteristik rapat-rapat pada Masa Persidangan II ditekankan pada kegiatan pelaksanaan ketiga fungsi Dewan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun alokasi waktu

untuk pelaksanaan setiap fungsi akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Dengan memperhatikan alokasi waktu tersebut, Pimpinan Dewan mengharapkan agar para anggota dewan berikut berbagai alat kelengkapan DPR dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional Dewan secara optimal.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 pada Masa Persidangan lalu, sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) RUU, ditambah dengan 5 (lima) kategori RUU kumulatif terbuka. Dari Prolegnas jangka lima tahunan tersebut, sebanyak 58 (lima puluh delapan) RUU ditambah dengan 5 (lima) kategori RUU kumulatif terbuka, ditetapkan sebagai RUU prioritas Tahun 2010.

RUU prioritas tahun 2010 telah disusun atas dasar urgensi kepentingan hukum yang akan dibuat; perintah UUD Negara RI tahun 1945; perintah TAP MPR; perintah UU; Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Kerja Pemerintah; dan mengakomodasi aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, dalam prioritas telah disusun meliputi semua aspek, mulai perekonomian, politik, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut antara lain tercermin dari tercantumnya RUU tentang Perekonomian Nasional/Demokrasi Ekonomi, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Penyempurnaan RUU yang terkait dengan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU Perubahan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan sebagainya.

Di dalam Prolegnas RUU prioritas Tahun 2010, juga dipetakan pemrakarsa RUU, yaitu pemerintah atau DPR, dengan maksud memudahkan koordinasi dalam penyusunan. Dengan demikian Dewan perlu mempersiapkan diri menyiapkan RUU yang tercatat sebagai RUU yang akan diprakarsai oleh DPR-RI.

Pada Masa Sidang ini, Dewan akan mulai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk yang pertama kali dalam periode ini. Terdapat beberapa perubahan ketentuan dan mekanisme pembahasan RUU yang diatur di dalam Tata Tertib yang baru. Diantaranya mengenai adanya pembatasan waktu pembahasan RUU dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) kali masa sidang**, yang diatur di dalam Pasal 141 ayat (1). Badan Musyawarah dapat memperpanjang jangka waktu pembahasan tersebut, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali Masa Sidang atas permintaan pimpinan alat kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan beberapa pertimbangan.

Dengan adanya penetapan jangka waktu tersebut, diharapkan mekanisme pembahasan RUU di berbagai alat kelengkapan Dewan dapat lebih efektif tidak berlarut-larut dan dapat diprediksi penyelesaiannya, sehingga target Prolegnas prioritas tahunan dan lima tahunan dapat terwujud.

Namun demikian, **Dewan tidak akan semata-mata mementingkan aspek kuantitas dengan mengabaikan aspek kualitas**. Pembentukan *legal policy* tetap akan memperhatikan aspirasi masyarakat dan sedapat mungkin mengakomodasi dan mempertemukan kepentingan seluruh *stakeholder* yang ada.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010, Dewan akan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. Sesuai amanat UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 23E Ayat (3) berbunyi: hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai undang-undang. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APBN Tahun 2008 yang sudah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh Dewan.

Dalam siklus anggaran, pembahasan terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN hendaknya disikapi sebagai tugas dan tanggungjawab Dewan sebagai langkah untuk mengawasi

berbagai kebijakan dan efektivitas dari setiap anggaran yang sudah disetujui.

Oleh karena itu, Dewan melalui Badan Anggaran yang ditugaskan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN merupakan bentuk pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan dari anggaran Negara secara keseluruhan, baik dari aspek kebijakan, program dan kegiatannya serta aspek pelaksanaannya. Sehingga Dewan mengetahui sejauhmana kemanfaatan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama tiga (3) bulan, melibatkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN DPR-RI) untuk melakukan telaahan lebih dahulu terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit BPK. Sebagai badan baru alat kelengkapan Dewan, tentunya diperlukan kerja keras dengan didukung oleh tenaga ahli di bidangnya.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dinamika politik di tanah air akhir-akhir ini diwarnai dengan besarnya perhatian publik dan besarnya porsi pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik terkait dengan kasus dana talangan Bank Century senilai Rp. 6,7 Triliun. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah membentuk Panitia Angket DPR-RI mengenai Pengusutan Kasus Bank Century pada Masa Persidangan yang lalu.

Keseriusan Panitia Angket untuk mengusut permasalahan ini secara efektif dan transparan, tercermin dari pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan waktu reses dan menetapkan rapat-rapat Panitia Angket dilakukan **secara terbuka**, yang hal ini mendapatkan respon positif masyarakat karena dengan keputusan ini masyarakat dapat mendengar dan menyaksikan secara langsung bagaimana Panitia Angket ini bekerja.

Panitia Angket telah meminta keterangan dalam rangka konsultasi dengan BPK dan PPATK. Selain itu, terkait dengan substansi masalah merger dan aliran dana Bank Century, Panitia Angket juga telah meminta keterangan kepada Deputi Gubernur dan Mantan Gubernur, termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini menjabat sebagai

Wakil Presiden, dan pejabat BI lainnya, terkait dengan permasalahan ini. Panitia Angket masih akan meminta keterangan beberapa pihak, termasuk Menteri Keuangan, KSSK, dan LPS.

Dewan dapat merasakan adanya optimisme berbagai kalangan disamping munculnya pesimisme terhadap penuntasan penanganan kasus Bank Century yang sekarang ini ditangani oleh Panitia Angket DPR-RI. Baik optimisme maupun pesimisme dari berbagai kalangan masyarakat perlu dijawab oleh Panitia Angket. Dengan masa kerja enam puluh (60) hari Panitia Angket harus dapat menghasilkan rekomendasi yang benar-benar obyektif. Memberikan hasil yang maksimal, dapat menjawab terhadap kasus talangan Bank Century, sebagaimana yang dipertanyakan masyarakat luas, walaupun waktu tersebut dapat diperpanjang.

Hasil kerja Panitia Angket menjadi ujian bagi DPR-RI, apakah DPR mampu membangun wibawa dan kredibilitasnya di tengah-tengah keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR-RI. Oleh karena itu, sisa waktu satu bulan ke depan, Panitia Angket harus bekerja maksimal untuk melakukan penyelidikan dan menghasilkan rekomendasi sebagai bagian dari hak pengawasan Dewan. Pimpinan DPR mendorong agar penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dan Polri dapat bekerja sama dalam rangka menindaklanjuti adanya indikasi pidana dalam pengelolaan Bank Century, bekerja cepat dan cerdas agar kerugian Negara dapat diminimalisir dengan mengembalikan aset-aset Bank Century yang dibawa ke luar negeri oleh pemilik/pengelola Bank Century.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Masih kaitannya dengan fungsi pengawasan, Dewan periode ini untuk pertama kali juga telah melakukan Kunjungan Kerja, baik perorangan maupun Komisi ke daerah-daerah. Tidak kurang dari duapuluh dua (22) Provinsi telah dikunjungi komisi-komisi Dewan, Badan Anggaran dan BAKN.

Beberapa permasalahan yang ditemukan di daerah, antara lain: rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai daerah, administrasi kependudukan yang belum tertata rapi, masih banyaknya sengketa di bidang pertanahan, kualitas raskin yang pada umumnya masih rendah,

tumpang tindih penanganan *illegal logging*, dan berbagai permasalahan khususnya untuk wilayah-wilayah perbatasan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan juga tingkat kesejahteraan prajurit yang ditempatkan pada wilayah rawan di perbatasan RI dengan negara tetangga.

Khusus Provinsi Papua yang telah dikunjungi Komisi I dan Komisi III, sangat memerlukan perhatian, karena provinsi ini pembangunannya cenderung lambat jika dibanding dengan wilayah Provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi Papua hingga saat ini sangat rentan terhadap isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena di provinsi ini banyak terjadi gangguan keamanan dan adanya isu separatism sebagai bentuk protes dari keterlambatan proses pembangunan di wilayah ini. Tercermin dari terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan ketidakadilan (*injustice*) bagi masyarakat Papua.

Dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, sebenarnya tuntutan sebagian masyarakat Papua praktis sudah terjawab karena dengan otonomi khusus, diharapkan terjadi percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua guna menyelesaikan persoalan mendasar yaitu menghilangkan kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, dan tingkat kesehatan yang rendah. Namun masalahnya adalah anggaran Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) yang jumlahnya mencapai 30 triliun belum memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan rakyat Papua.

Temuan dan permasalahan hasil Kunjungan Kerja akan menjadi bahan bagi anggota Dewan dan komisi-komisi pada saat melaksanakan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing dalam Masa Sidang II ini.

Selain melakukan tiga fungsi utama tersebut, pada Masa Sidang ini, Dewan akan membahas mengenai hak Dewan di dalam penentuan Pejabat Publik, yaitu memproses pencalonan Hakim Agung; memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Negara Sahabat; dan memproses calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Sampai saat ini, Dewan juga masih menunggu usulan Calon Gubernur BI yang diajukan Presiden yang sampai saat ini masih belum terisi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian Dewan dalam masa sidang yang dimulai hari ini difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan perhatian terhadap dunia internasional.

Di bidang politik antara lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang akan dilaksanakan tahun 2010. Dewan berharap KPU beserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga Bawaslu dan Panwaslu Pilkada Provinsi dan Panwaslu Pilkada Kabupaten/Kota yang terbentuk bisa mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dengan sebaik-baiknya. Kami berharap masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar dapat segera dituntaskan, sehingga kasus-kasus yang terjadi pada pemilihan umum yang lalu (baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden) terkait DPT tidak terulang kembali pada pelaksanaan Pilkada dan sengketa terkait dengan permasalahan regulasi, pemilihan panwas pilkada perlu diantisipasi dan disikapi dengan arif dan bijaksana.

Terkait dengan ide usulan pelaksanaan Pilkada serentak, kami meminta bisa dilakukan pengkajian secara mendalam khususnya mengenai waktu pelaksanaan, apakah siap dilaksanakan tahun 2011, 2012, atau tahun 2013. Disain pemilu secara serentak yang dilaksanakan dua kali yaitu pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu eksekutif untuk memilih Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati dipastikan dapat menghemat keuangan negara. Namun demikian masih diperlukan pengkajian dan pembahasan secara matang antara DPR dan Pemerintah, disamping adanya wacana Pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Untuk mewujudkan *good governace*, reformasi birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, kearah terciptanya birokrasi pemerintahan yang lebih terbuka dan kompetitif, merupakan hal yang sangat diperlukan. Dalam kelembagaan dituntut terbentuknya struktur yang lebih ramping dan kaya fungsi, dengan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk terselenggaranya sistem pemerintahan yang efektif, kredibel dan akuntabel, responsif terhadap perubahan serta berpihak kepada rakyat. Reformasi birokrasi diperlukan untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan, pencegahan korupsi, dan perbaikan sistem.

Pada sisi lain, satu elemen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, kesiapan aparatur pemerintah/birokrasi serta hal-hal lainnya yang terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus selesai dan berakhir pada tanggal 30 April 2010 mendatang.

Khususnya mengenai peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari UU ini agar mengacu kepada jiwa dan semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebab berdasarkan pengalaman, pemerintah sering kali mengeluarkan peraturan pemerintah yang isinya tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UU tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih terkait dengan bidang politik, masalah penegakan hukum dan utamanya pembangunan hukum, harus mendapat perhatian Dewan. Adanya ketimpangan antara **hukum dalam harapan** dengan **penerapan hukum dalam kenyataan** akan menjauhkan hukum dari wujud keadilan yang dicita-citakan. Banyaknya pemberitaan mengenai perkara hukum di media massa yang menimpa masyarakat yang lemah, berpotensi menggugah rasa keadilan masyarakat dan memunculkan solidaritas. Kasus Bi Minah yang mencuri tiga biji bibit kakao dengan kasus BLBI yang tidak terselesaikan, telah mengusik rasa keadilan rakyat, merupakan dua bentuk kasus ekstrim yang menggambarkan diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kondisi seperti itulah, perlu upaya keras untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kinerja institusi penegak hukum, khususnya lembaga peradilan juga banyak

mendapat sorotan. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari institusi penegak hukum. Dalam kaitan ini, institusi penegak hukum harus meningkatkan profesionalitas, menjaga wibawa dan mengedepankan independensinya.

Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan salah satu ketentuan di dalam norma dasar konstitusi kita. Dengan demikian perlu disadari bahwa hukum harus ditegakkan melalui sistem yang dibangun dan lembaga yang berwenang, **bukan keadilan di jalanan**, bukan pula pengadilan oleh media massa (*trial by the press*). Namun hal itu tidak akan terjadi apabila lembaga penegak hukum bekerja secara optimal dan profesional.

Maraknya mafia peradilan dan kurangnya kesadaran menerapkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), atau karena ego sektoral institusi penegak hukum, berimplikasi pada melemahnya kewibawaan institusi penegak hukum dan lembaga peradilan. Pembinaan di institusi penegak hukum perlu terus dilaksanakan dan dimantapkan demi memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Di bidang ekonomi, satu hal yang sangat mendapat perhatian Dewan adalah masalah era perdagangan bebas kawasan ASEAN (AFTA) dan perdagangan kawasan ASEAN dengan China (*CAFTA: China-ASEAN Free Trade Area*) yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Ini artinya, Indonesia siap tidak siap, harus bersaing sesama negara ASEAN dan dengan negara China, yang dari aspek ekonomi merupakan salah satu negara industri maju di Asia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 8-9% per tahun.

Menyikapi fenomena tersebut, Dewan di dalam rapat-rapat kerjanya menjelang akhir masa sidang yang lalu, telah melakukan bahasan dan berpendapat bahwa dengan sistem perekonomian kita yang terbuka, mau tak mau harus dapat menyesuaikan (*adjustment*) terhadap kecenderungan perdagangan global, termasuk upaya untuk menghapus berbagai hambatan di bidang perdagangan luar negeri, baik hambatan tarif maupun hambatan yang bersifat non-tarif (*tariff and non-tariff barriers*).

Kalangan Dewan berpendapat dan mendesak pemerintah agar pelaksanaannya dapat ditunda dan dilakukan renegotiasi agreement, dengan mempertimbangkan faktor kesiapan Indonesia, khususnya dalam sektor industri, daya saing, kapasitas dan trend *trade balance*, keseimbangan hulu dan hilir serta kebijakan makro industri lainnya yang belum siap. DPR telah mengirim surat yang ditandatangani Ketua DPR yang ditujukan kepada Presiden RI tertanggal 15 Desember 2009 nomor PW.01/7606/DPR RI/XII/2009 yang mengusulkan tentang renegotiasi FTA ASEAN China. Kita menyambut baik, bahwa pemerintah telah merespons dengan mengajukan penundaan terhadap 314 pos tarif dari kesepakatan yang telah dicapai.

Walaupun terbuka peluang untuk mengajukan keberatan atau menunda pelaksanaannya, Pemerintah harus tetap membenahi iklim usaha terutama terkait dengan penataan ekonomi biaya tinggi dan memperbaiki strategi kebijakan yang mendukung kegiatan bisnis, sehingga produk Indonesia mampu bersaing dengan produk China.

Persaingan bisnis dengan China memang sulit, tetapi Indonesia harus berusaha agar hubungan perdagangan antara China dan Indonesia tetap harus berjalan baik, namun di sisi lain kepentingan pengusaha Indonesia harus tetap terjaga dan terjamin dengan baik, dan Pemerintah harus mampu menciptakan keadilan dalam persaingan yang terbuka

Sekarang ini Pemerintah telah membentuk tim bersama dalam mempersiapkan langkah untuk menghadapi FTA-China yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian dan melibatkan Pemimpin Apindo dan KADIN Indonesia serta unsur menteri Perdagangan dan pejabat-pejabat departemen terkait. Tim ini akan melakukan koordinasi interdepartemen dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Namun, sangat disayangkan pembentukan tim ini agak terlambat. Bahkan, peraturan menteri keuangan tentang FTA belum juga diterbitkan.

Dalam kaitan ini, Dewan mengharapkan kiranya RUU tentang Perdagangan dan RUU Perubahan atas UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian yang telah masuk dalam Prolegnas harus dipacu penyelesaiannya, mengingat berbagai permasalahan yang muncul di dalam era globalisasi ini, terutama kaitannya dengan FTA-China.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Di tengah sulitnya perekonomian global saat ini, Pemerintah harus lebih kreatif dan bekerja keras dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,5% yang ditargetkan dalam APBN 2010. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% tidak mudah. Sedangkan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2009 lalu diperkirakan tercapai hanya sebesar 4,3%. Dewan menilai target pertumbuhan ekonomi 5,5% optimis dapat dicapai, apabila juga didukung oleh pertumbuhan investasi.

International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 akan mencapai 4% dan 4,8% pada tahun 2010 mendatang. IMF juga memproyeksikan sektor finansial global diharapkan akan berangsur pulih pada Semester Pertama (I) tahun 2010. Perekonomian global menurut perhitungan Dana Moneter Internasional (IMF) tumbuh sebesar 3,1%.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sebagian besar ditopang oleh faktor konsumsi dan ekspor-impor, serta investasi pemerintah melalui APBN. Untuk itu, kalangan Dewan berpendapat, Indonesia sangat mengharapkan percepatan khususnya pertumbuhan investasi asing (*foreign direct investment*) di dalam negeri.

Diakui bahwa pertumbuhan investasi asing masih sangat lambat. Pemerintah harus terus melakukan perbaikan sistem perizinan untuk berinvestasi/berusaha. Dewan menyambut baik adanya percepatan proses perijinan berinvestasi yang tidak bertele-tele dan dapat dilakukan dalam waktu hanya 10 hari kerja. Dengan demikian Indonesia diharapkan dapat menaikkan peringkat (*rating*) kemudahan berbisnis ke peringkat 50 dari 183 negara. Disamping itu, faktor non-ekonomi, seperti situasi politik dalam negeri yang kondusif tentu juga sangat diharapkan dalam mendorong stabilitas ekonomi dan tercapainya target pertumbuhan tahun 2010.

Memasuki tahun 2010, Pemerintah juga masih akan melanjutkan sejumlah program subsidi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin, meskipun besaran subsidi akan berkurang dan mekanismenya akan berubah. Hal ini dikarenakan pemerintah nampaknya akan

menerapkan harga BBM ke mekanisme pasar. Pemerintah juga akan melanjutkan stimulus fiskal meski nilainya tidak signifikan untuk mendukung stimulus fiskal yang sudah direncanakan pada 2009. Pemerintah juga harus melakukan revitalisasi industri, terutama industri manufaktur. Industri manufaktur tahun 2010 ditargetkan tumbuh 1,3%.

Kalangan Dewan menilai pertumbuhan industri manufaktur 1,3% pada tahun 2010 terlalu kecil, mengingat industri manufaktur dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Pemerintah harus mencegah agar *de-industrialisasi* tidak berkembang kepada sub-sektor industri lain, khususnya pasca berlakunya FTA ASEAN-China.

Dalam pada itu, stabilnya pasar dalam negeri sepanjang tahun 2009 lalu yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat inflasi, merupakan momen baik di tahun 2010 ini. Dewan yakin otoritas moneter juga dapat mempertahankan tingkat inflasi yang rendah di tahun 2010. Kebijakan moneter melalui manajemen tingkat suku bunga perbankan sangat sensitif dan sangat mempengaruhi tingkat gejolak moneter dan tingkat di pasar uang.

Oleh sebab itu, otoritas moneter harus tetap mampu menjaga stabilitas suku bunga perbankan, tanpa harus mengorbankan pertumbuhan di sektor riil. Manajemen tingkat suku bunga perbankan oleh otoritas moneter adalah hal penting dalam meredam inflasi. Dewan berpendapat, tingkat inflasi yang rendah adalah salah satu tujuan dari berbagai kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter. Kita tidak ingin lagi mengalami tingkat inflasi diatas dua digit pada krisis moneter 1998.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Keinginan pemerintah untuk menaikkan defisit APBN tahun 2010 dari 1,6% terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 2%, bisa menimbulkan resistensi politik dari Dewan. Hambatan bisa terjadi, jika kenaikan defisit itu dimaksudkan untuk kepentingan yang dasar kebutuhannya sangat lemah, antara lain perbaikan kesejahteraan pegawai negeri atau pejabat negara.

Dalam APBN 2010, pemerintah memang diberi wewenang untuk menaikkan defisit menjadi 2%, apabila ada beberapa anggaran belanja

yang perlu ditambahkan. Pemerintah sebaiknya tidak memunculkan ide-ide baru yang sifatnya dadakan dan mengejutkan, misalnya kemungkinan anjloknya penerimaan dari bea masuk yang menjadi dampak dari berbagai perjanjian perdagangan bebas ASEAN- China tahun 2010 ini.

Defisit hendaknya dipergunakan untuk sektor-sektor yang produktif dan bermanfaat untuk mendorong perekonomian, seperti menambah belanja modal pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di daerah-daerah, khususnya daerah di luar pulau Jawa yang mengalami kerusakan infrastruktur cukup parah. Peningkatan defisit anggaran 2010 masih dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian domestik, bukan untuk kepentingan yang tidak menyentuh ekonomi masyarakat banyak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan perkembangan sejumlah masalah di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan, Dewan melihat adanya beberapa hal yang perlu dicermati dan mendapat perhatian kita bersama.

Putusan Mahkamah Agung mengenai penyelenggaraan ujian nasional beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu fokus perhatian Dewan. Melalui komisi terkait, Dewan telah memutuskan bahwa masing-masing fraksi perlu menyikapi masalah ujian nasional untuk selanjutnya dibahas kembali dalam rapat kerja antara komisi dengan pemerintah.

Dewan juga perlu mengingatkan kepada pemerintah mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan guru serta antisipasi untuk mengatasi dampak psikologis pelaksanaan ujian nasional bagi peserta didik dan kemungkinan munculnya kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dewan juga menaruh perhatian terhadap faktor sumber daya manusia tenaga kependidikan dan kemampuan peserta didik untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dewan memandang

Pemerintah perlu memprioritaskan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang telah masuk dalam *data base* Badan Kepegawaian Negara untuk segera diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesejahteraan mereka, sehingga kasus keterlambatan pemberian tunjangan kesejahteraan yang terjadi di beberapa daerah tidak terjadi lagi.

Demikian juga untuk guru-guru swasta di bawah pengelolaan yayasan, hendaknya juga mendapat perhatian Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Dewan sangat mendukung rencana Pemerintah untuk memberikan bea siswa bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dewan berharap agar pelaksanaan pemberian bea siswa tersebut benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian beasiswa ini kiranya juga dapat dipikirkan untuk diberikan kepada mereka yang terpaksa harus menempuh pendidikan swasta karena terbatasnya daya tampung sekolah negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Upaya untuk membina, menjaga, dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa harus terus menerus kita lakukan. Dalam kaitan itu, Dewan perlu menyampaikan apresiasi atas terbitnya kesepakatan bersama antara Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Kepolisian Negara RI untuk membuat perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dewan berharap agar prinsip-prinsip yang ada dalam kesepakatan ini, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, menjamin tumbuh kembang dan partisipasi anak, dan putusan penahanan serta proses peradilan formal merupakan upaya terakhir benar-benar dapat diterapkan. Namun demikian, Dewan juga perlu mengingatkan beberapa masalah penting yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, antara lain masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dan masih terbatasnya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Untuk itu Dewan mengharapkan agar implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat lebih dioptimalkan, apalagi sekarang ini Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ditambah Perlindungan Anak.

Dalam kesempatan ini Dewan juga ingin menyampaikan selamat atas keberhasilan kontingen Indonesia yang menduduki peringkat ketiga dalam ajang pesta olahraga se Asia Tenggara (SEA GAMES) XXV di Laos yang baru lalu, walaupun hal ini cukup memprihatinkan, mengingat negara kita pernah menjadi nomor satu di pentas olah raga negara-negara Asia Tenggara ini.

Di tengah keprihatinan kita terhadap prestasi tersebut, ada beberapa cabang olah raga yang berhasil menunjukkan prestasi, seperti pada cabang atletik. Keberhasilan ini hendaknya menjadi pemacu bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pembinaan terhadap dunia olahraga di Indonesia. Selain prestasi atlet, aspek lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan SEA GAMES XXVI pada tahun 2011 mendatang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah sosial lainnya yang menjadi fokus perhatian Dewan adalah masalah ketenagakerjaan. Di satu sisi, kita patut bersyukur karena ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global tidak terjadi sepenuhnya. Bahkan, pemerintah telah berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka.

Namun demikian, Dewan memandang bahwa kita masih tetap menghadapi tantangan berat dalam upaya untuk menyejahterakan tenaga kerja. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, baru 27 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan dari jumlah tersebut, baru 12 provinsi yang menetapkan UMP di atas 90% Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Oleh karena itu Dewan berharap agar pemerintah secara terus menerus dapat meningkatkan UMP di provinsi-provinsi yang memiliki UMP

di bawah 90%, sehingga kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan tenaga kerja juga dapat meningkat. Selanjutnya, masalah TKI dan Program Sertifikasi Keahlian TKI sebagai persyaratan memperoleh visa tenaga kerja, perlu mendapat penanganan dengan baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Isu lingkungan hidup, pemanasan global, dan perubahan iklim sudah tentu juga harus selalu menjadi perhatian kita. Pemanasan global yang memicu perubahan iklim telah memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia di planet bumi. Dewan berpendapat, harus ada upaya-upaya nyata yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghadapi fenomena global ini.

Berkaitan dengan hal ini, Dewan turut prihatin atas hasil yang dicapai dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, Desember lalu, yang belum memuaskan kita semua, karena kesepakatan yang dihasilkan tidak memuat terobosan penting dalam pengendalian pemanasan global. Namun demikian, sudah tentu kita tidak boleh menyerah begitu saja. Dewan berharap Pemerintah Indonesia, baik di tingkat global maupun nasional, dapat mengupayakan langkah-langkah yang lebih tegas lagi dalam menyelamatkan planet bumi dari ancaman perubahan iklim global.

Dewan memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah memberikan usulan yang jernih dan cemerlang yang mampu memecahkan kebuntuan mengenai perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang mengenai penurunan emisi gas karbon (CO₂). Bahkan, Presiden RI menyatakan Indonesia akan memangkas emisi gas karbon sebesar 26% sampai tahun 2020, dan bahkan 41% jika ada bantuan internasional.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah tentu kita juga perlu memberi perhatian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di berbagai kawasan dunia, khususnya perkembangan yang terjadi di

kawasan Asia. Kita tentu prihatin bahwa situasi politik dan keamanan di sejumlah negara Asia hingga saat ini belum juga menunjukkan suasana yang kondusif. Aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil masih saja terus berlangsung di Irak, Afghanistan dan baru-baru ini di Pakistan..

Sementara itu, proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, belum juga menunjukkan kemajuan berarti. Indonesia seharusnya dapat memainkan peran yang lebih signifikan terhadap penyelesaian masalah ini. Memang harus diakui, selama ini Indonesia belum maksimal berperan aktif membantu mengusahakan terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia sangat mendukung berdirinya Negara Palestina Merdeka. Kini sudah saatnya keinginan pembentukan Negara Palestina Merdeka perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Indonesia harus memperjuangkannya, tidak sekedar wacana.

Memasuki tahun 2010, Dewan berharap situasi politik dan keamanan internasional akan semakin membaik, khususnya situasi politik dan keamanan di beberapa kawasan Asia tadi. Dewan juga berharap situasi politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dapat terus terpelihara dengan baik, terutama melalui penguatan kerjasama ASEAN.

Indonesia, sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia, sudah tentu dapat meningkatkan lagi peranannya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Peran ini juga dapat dilakukan oleh parlemen, dan oleh karena itu Dewan pun berharap DPR RI, melalui pelaksanaan diplomasi parlementer di berbagai forum keparlemenan internasional, dapat lebih berperan aktif lagi dalam turut mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan ini perlu juga kami sampaikan, bahwa DPR RI pada tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2009 yang lalu di Bandung telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Pleno ke-4 *Asian Parliamentary Assembly* (APA). Sidang yang dihadiri oleh 27 Parlemen Negara-negara Anggota APA dan 13 observer tersebut telah menghasilkan

sejumlah resolusi yang berkaitan dengan isu-isu politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta sosial dan budaya.

Sidang juga telah menghasilkan *Bandung Declaration on the Roles of Asian Parliaments in Strengthening Democracy towards Prosperity, Peace and Justice in Asia*. Melalui Bandung Deklarasi ini, Parlemen-parlemen Anggota APA meneguhkan komitmen bersama untuk terus memperkuat demokrasi guna mencapai kemakmuran, kedamaian dan keadilan di Asia.

Delegasi DPR-RI, sebagai tuan rumah, juga telah berperan aktif dalam berbagai sidang APA di Bandung ini, antara lain melalui kepemimpinannya dalam *Drafting Committee* Bandung Deklarasi. Dewan berharap peran aktif Delegasi DPR-RI ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan dalam forum-forum keparlemenan internasional lainnya.

Dalam kesempatan Sidang APA tersebut juga telah dilahirkan dua (2) *Presidential Statement* berkaitan dengan Hari Anti Korupsi se-Dunia pada tanggal 9 Desember 2009. Para ketua-ketua delegasi telah memberikan komitmen bersama bahwa korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat kompleks, sistemik dan dapat merusak serta menggerogoti sendi-sendi pembangunan bangsa dan berakibat pada kemunduran bangsa serta menyengsarakan masyarakat.

Delegasi APA juga mendukung bagi pembentukan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang kemudian ditindaklanjuti dalam Sidang ke-58 Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.

Oleh karena itu, bersama-sama dengan anggota APA, kita telah mendukung *Presidential Statement* dalam rangka Hari Anti Korupsi se-Dunia. Pada kesempatan Sidang APA, Indonesia selaku Presiden APA juga meminta ketua-ketua parlemen anggota APA untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menegakkan hak asasi manusia dalam rangka *Human Right Day* (Hari Hak Asasi Manusia) melalui *Presidential Statement* pada tanggal 10 Desember 2009.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan oleh Dewan dalam kerangka pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, serta beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Dewan memasuki Masa Persidangan II ini. Sebelum kami mengakhiri Pidato Pembukaan Masa Persidangan II, perlu kami beritahukan bahwa BURT DPR-RI telah menyusun Renstra DPR-RI 2010-2014 yang memuat antara lain, Rencana *grand design* kawasan kompleks gedung MPR-DPR-DPD RI. BURT telah menyiapkan kuesioner untuk seluruh Anggota Dewan. Oleh karena itu, mohon kesediaan para Anggota Dewan untuk mengisinya.

Dan akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah rabbil'alamin*, maka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010 ini, kami nyatakan ditutup. Selamat bertugas. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 4 Januari 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**



H. MARZUKI ALIE